

Kolaboratif Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Wilayah

by Akadun Akadun

Submission date: 30-Jul-2022 08:19AM (UTC-0400)

Submission ID: 1876868341

File name: aboratif_Governance_Dalam_Penangulangan_Covid-19_Di_Wilayah.pdf (253.98K)

Word count: 4674

Character count: 31138

Kolaboratif Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Wilayah Kabupaten Lingga

Zamroni¹, Akadun², Arifin³

Magister Administrasi Publik Program Studi Ilmu Administrasi
Universitas Terbuka

Article Info

Article history:

Received : 09 April 2022

Publish : 01 Juli 2022

Keywords:

collaborative governance,
prevention,
Covid-19,
Lingga Regency

ABSTRACT

The government has continued to undertake intensive measures to combat COVID-19 since the beginning of March 2020 to lower the pace of COVID-19 spread. Based on preliminary findings, there is a collaborative approach in Lingga Regency that has not been fully utilized, with indications of a lack of material assistance in addressing the needs of facilities and infrastructure from every village in the regency. The goal of this study is to look into "Collaborative Governance in the Lingga Regency in Combating COVID-19." This study used a qualitative method with a descriptive approach as the research method. According to the findings, the Starting Condition is characterized by adequate resources; the Collaborative Process is characterized by an interactive discourse, growing trust, dedication to the process, and mutual understanding; and the End State is characterized by a lack of resources. Facilitative Leadership is characterized by a large number of facilities and infrastructure that may meet current needs but are underutilized; The Lingga Regency administration has done an excellent job with institutional design, which includes participation, the role of external parties, and policy regulations. Meanwhile, financial indications that stymie collaboration, such as the fact that small company aid is not particularly controlled, and public view that there is still suspicion in Covid-19 and a refusal to be vaccinated, can stymie the current partnership process.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 09 April 2022

Publis : 01 Juli 2022

ABSTRAK

Dalam menanggulangi COVID-19, pemerintah terus berupaya secara intensif mulai dari awal bulan Maret 2020 untuk mengurangi laju penyebaran COVID-19. Berdasarkan hasil awal observasi, terdapat *collaborative process* yang belum maksimal di Kabupaten Lingga dengan bukti minimnya dukungan materil dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dari setiap desa yang ada di Kabupaten Lingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji "Kolaboratif Governance dalam Penanggulangan COVID-19 di Wilayah Kabupaten Lingga". Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Starting Condition* ditandai dengan sumber daya telah tercukupi dengan baik; *Collaborative Process* ditandai dengan adanya dialog

antar muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama; *Facilitative Leadership*, ditandai dengan sarana dan prasarana dari sisi jumlah sudah dapat memenuhi kebutuhan yang ada namun penggunaannya masih minim; *Institutional design*, ditandai dengan partisipasi, peranan pihak eksternal dan aturan kebijakan sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Lingga. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator *financial* yaitu belum diaturnya secara spesifik bantuan pada usaha kecil dan opini masyarakat yang masih terdapat ketidakpercayaan pada Covid-19 dan tidak ingin divaksin dapat menghambat proses kolaborasi yang ada.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Zamroni

Magister Administrasi Publik Program Studi Ilmu Administrasi

Email Coorespondent: zamroniismaildb@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam menanggulangi COVID-19, pemerintah terus berupaya secara intensif mulai dari awal bulan Maret 2020 untuk mengurangi laju penyebaran COVID-19. Pemerintah memproyeksikan wabah COVID-19 dapat berdampak lebih besar lagi apabila tidak dilakukan upaya pemulihan sektor perekonomian. Selain itu, terdapat pula fakta bahwa lingkungan kebijakan di luar pemerintah senantiasa berubah dan bergeser secara dinamis. Perubahan atau pergeseran lingkungan kebijakan bisa dalam bentuk isu yang semakin meluas ke arah yang abnormal, bentuk dan jumlah aktor kebijakan yang meningkat, kapasitas yang dimiliki oleh aktor di luar pemerintah yang semakin besar, serta respons atau inisiatif masyarakat yang semakin meluas (Sudarmo, 2009). Tidak berlebihan jika kemudian O'Leary (2014) menjadikan *collaborative governance* sebagai pilihan terpenting untuk membangun masa depan kebijakan publik di sebuah negara.

Berikut ini adalah data kasus positif COVID-19 di Kabupaten Lingga selama bulan Agustus 2021:

Tabel 1. Jumlah Kasus COVID-19 di Kabupaten Lingga

No	Tanggal	Jumlah Kasus Positif COVID-19	Persentase Penduduk
1	06 Agustus 2021	4.334	4,3%
2	13 Agustus 2021	4.980	5,0%
3	20 Agustus 2021	5.234	5,3%
4	27 Agustus 2021	5.430	5,5%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga

Berdasarkan Tabel 1 di atas, jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Lingga adalah sebanyak 98.633 jiwa dengan nilai persentase penduduk yang terdampak kasus positif COVID-19 sebanyak 5,5% pada tanggal 27 Agustus 2021. Persentase ini menunjukkan bahwa tingkat kasus positif COVID-19 yang ada di Kabupaten Lingga berada pada zona merah. Menurut Kementerian Kesehatan, suatu daerah yang mengalami kasus positif COVID-19 di atas 3% dari total keseluruhan penduduk termasuk ke dalam zona merah, yang artinya daerah tersebut harus segera menerapkan pengendalian dan penanggulangan yang tepat terhadap wilayahnya.

Berdasarkan hasil awal observasi di lapangan terdapat permasalahan dalam kolaboratif *governance* dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah Kabupaten Lingga, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Terdapat kondisi awal (*starting condition*) berupa kesenjangan kompetensi sumber daya manusia yang bekerja secara kolaboratif dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah Kabupaten Lingga. Satgas Penanggulangan Covid-19 terdiri dari dua orang di setiap kecamatan dengan dukungan yang minim dalam memberikan informasi karena letak geografis Kabupaten Lingga yang berada di kepulauan dan Satgas adalah masyarakat umum.
- 2) Terdapat faktor *institutional design* berupa belum adanya transparansi dan partisipasi yang berfokus pada penanggulangan Covid. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan peranan anggota Satgas Penanggulangan Covid sehingga sering menjadi penghambat dalam pemahaman bersama dalam menentukan langkah-langkah penanggulangan Covid seperti adanya keterlibatan Satgas Covid dengan pekerjaan lain karena kebutuhan ekonomi yang mendesak di Kecamatan Lingga Selatan, Selayar dan Senayang sehingga Satgas belum berfokus pada penanggulangan Covid.
- 3) Terdapat faktor kepemimpinan (*leadership*) yang masih belum optimal di Kabupaten Lingga, hal ini dibuktikan melalui peranan Bupati Kabupaten Lingga yang hanya mengunjungi secara langsung beberapa Kecamatan Utama di Kabupaten Lingga dan belum adanya kesamarataan yang diterima masyarakat sehingga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penanggulangan Covid
- 4) Terdapat *collaborative process* yang belum maksimal di Kabupaten Lingga dengan bukti minimnya dukungan materil dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dari setiap desa yang ada di Kabupaten Lingga. Beberapa layanan Kesehatan di Kecamatan Singkep Pesisir hanya membuka jam operasional hingga pukul 15.00 sehingga masyarakat tidak memiliki alternatif lain dalam berkontribusi untuk penanggulangan Covid-19

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka judul yang di angkat dalam penelitian ini adalah “Kolaboratif *Governance* dalam Penanggulangan COVID-19 di Wilayah Kabupaten Lingga”

2.1. Konsep *Collaborative Governance*

Kooiman (2003) mengklasifikasi konsep kolaborasi dalam model *governance* menjadi 3 bagian yaitu *Self-Governance*, *Co-Governance* dan *Hierarchy Governance*. Bagian pertama *Self-Governance* mengacu kepada kapasitas entitas sosial untuk mengurus diri mereka secara otonom, terangkum dalam tiga pemikiran yaitu pertama *as autopoiesis* yaitu sistem sosial yang menutup diri dari lingkungannya. Kedua, *as actor constellations* yaitu proses yang dinamis yang terjadi antar aktor yang tidak hanya pemerintah tetapi juga ada aktor swasta dan masyarakat. Ketiga, *as patterns of interaction* dilihat dari aspek interaksi pemerintah dalam seluruh tingkat agregasi masyarakat serta juga memberikan ruang bagi aktor entitas politik lainnya untuk mempengaruhi kapasitas pemerintahan.

Ada beberapa yang dapat diklasifikasi yaitu *co-regimes*, *networks*, *public-private partnership*, *co-management*, *communicative governance* (Kooiman, 2003:106) bentuk yang terdiri dari :

1. *Collaboration*.

Kooiman (2003), namun menjadi hal yang berharga untuk menghadapi tantangan sosial politik. Penekanan penting dalam kolaborasi adalah adanya keragaman akan menjadi faktor penentu keberhasilan. kolaborasi seperti keragaman tujuan, keragaman input, dan keragaman kekuasaan. Sistem inovasi daerah erat kaitannya pada bentuk *co-governance* ini, karena terdapatnya dinamika hubungan antar aktor dalam penerapan SIDA yang sulit untuk dilakukan ditengah keragaman tujuan, input dan kekuatan sumber daya.

2. *Co-operation*

Merupakan hubungan yang lebih formal daripada *collaboration*. Konsep *cooperation* dipengaruhi oleh *game theory* yang mana aplikasi dari teori ini telah diuji dalam menganalisis hubungan internasional dan hubungan pemerintahan lainnya. Terdapat

dimensi yang menjadi faktor penentu dalam implementasi *co-operation* yaitu kepentingan bersama, bayangan akan masa depan, dan jumlah aktor (Kooiman, 2003).

Agranoff dan Mc Guire (2003) (dalam Raharja, 2008) telah mengembangkan konsep kolaborasi pada *city level collaboration* dengan konteks pembangunan ekonomi sehingga pihak yang terlibat tidak hanya *intergovernmental domain* tapi juga *nongovernmental sector*. Jenis dari manajemen kolaboratif yang diterapkan pada tiap kota diukur dari tingkat keterlibatan dalam aktivitas dan strategi.

Dari beberapa definisi diatas, peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada hakekatnya kolaborasi adalah suatu proses kerjasama antar beberapa pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dan tujuan bersama yang ingin dicapai. Bahkan kolaborasi dapat berlangsung dalam dua konteks, yaitu di dalam organisasi internal dan kolaborasi eksternal yang dilakukan beberapa organisasi baik publik, privat, dan warga masyarakat.

Sebagian besar pemerintah sebenarnya telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, tetapi sebagian besar kerjasama yang dibangun masih bersifat konvensional (non-kemitraan), yaitu sebatas pada kerjasama antara pemerintah sebagai pemilik pekerjaan dengan lembaga swasta sebagai *vendor* atau kontraktor. Kerjasama ini tidak lebih dari transaksi jual beli barang dan jasa antara pemerintah sebagai prinsipal dan pihak swasta sebagai agen. Kedudukan diantara keduanya tidak setara, pemerintah sebagai prinsipal mempunyai otoritas untuk memilih agen yang sesuai dengan kriteria yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan.

Fosler (2002) menjelaskan lebih rinci bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan *alignment* dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun *shared vision* dan berusaha mewujudkannya secara bersama-sama. Prasarat dasar agar *collaborative governance* dapat terwujud perlu adanya visi bersama yang diyakini sebagai gambaran masa depan oleh *stakeholder*, dengan adanya visi yang sama maka setiap komponen memungkinkan untuk berpartisipasi dalam urusan yang disepakati bersama.

Dari konsep kolaboratif yang memungkinkan untuk terjadinya kerjasama di antara ketiga pilar *governance* karena sudah diyakini adanya visi bersama maka semakin menumbuhkan partisipasi yang tinggi pada sektor non pemerintah. Masyarakat dan pihak swasta memperoleh ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam manajemen urusan-urusan publik. Partisipasi dapat menumbuhkan *democratic governance* yang melibatkan masyarakat luas dari segala lapisan untuk menentukan agenda-agenda publik (Newman, Barnes, Sullivan, & Knops, 2004), dan dapat sebagai wujud dari transparansi dalam menumbuhkan *good governance* (Kim, Halligan, Cho, Oh, & Eikenberry, 2005).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*qualitative-descriptive*). Berdasarkan kepada pendapat Creswell (2013:4) yang mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan (Sugiyono, 2013) Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan empat jenis strategi, observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio visual.

3.1. Teknik Analisis

Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan yaitu : (1) melakukan pemetaan dan identifikasi aktor (individu atau organisasi) yang terlibat pada *collaborative governance* dalam penerapan sistem inovasi daerah, (2) menyusun kategori dan klasifikasi peran-peran aktor (individu atau organisasi) yang berkolaborasi tersebut, (3) mengidentifikasi keterkaitan relasi antar aktor (individu atau organisasi)

berkolaborasi, (4) menginterpretasi serta menjelaskan dinamika relasi aktor (individu atau organisasi) dalam berkolaborasi dan dimensi lain yang terbentuk, (5) menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran *Collaborative Governance* pada Penanggulangan COVID-19 dalam menerapkan AKB di Kabupaten Lingga

Peran *Collaborative Governance* pada penanggulangan COVID-19 dalam menerapkan AKB di Kabupaten Lingga terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sudah ditetapkan oleh Kabupaten Lingga sebagai berikut.

a. *Starting Condition*

1) Sumber Daya

Penanggulangan COVID-19 dengan menerapkan AKB merupakan hal yang harus dipersiapkan dari hal yang mendasar. Hal pertama yang harus dipersiapkan dalam penanggulangan COVID-19 disini adalah sumber daya. Sumber daya yang dimasukkan disini mencakup kecukupan jumlah tenaga kerja. Jika sumber daya sudah tercukupi penanggulangan COVID-19 akan semakin cepat terlaksana mengingat penanganan COVID-19 harus teratasi secara tepat dan cepat.

Sumber daya di Kabupaten Lingga tidak mengalami permasalahan menurut informan yang disampaikan informan. Hal ini terlihat sebagai berikut.

"Untuk Tenaga Kesehatan alhamdulillah sampai saat ini tercukupi". (Wawancara dengan Bupati Kabupaten Lingga Bapak Muhammad Nizar, S.Sos pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.14)

Berdasarkan tanggapan informan di atas memperkuat bahwa sumber daya Kabupaten Lingga tidak ada masalah dikarenakan setiap lembaga saling bekerja sama baik LSM, Pendidikan, dan Wartawan. Sehingga hal ini dapat mempercepat penanganan COVID-19 dengan penerapan kebijakan AKB di Kabupaten Lingga.

2) Insentif

Penanganan COVID-19 di Kabupaten Lingga merupakan hal yang cukup cekatan dan sangat tepat, hal utama yang membuat penanganan COVID-19 di Kabupaten Lingga cepat adanya ketersediaan Sumber Daya baik tenaga kesehatan maupun hal lainnya. Berdasarkan hal tersebut membuat Kabupaten Lingga mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat yaitu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini diperkuat dengan pernyataan berikut.

"Dapat penghargaan dari Gubernur Provinsi Kepri, beberapa bulan yang lewat di Batam, sebagai bentuk penghargaan atau piagam untuk memotivasi Kabupaten/Kota yang nilai cakap dalam penanggulangan Covid 19." (Wawancara dengan Bupati Kabupaten Lingga Bapak Muhammad Nizar, S.Sos pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.14)

3) *Pre-history*

Wabah COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan penurunan imun tubuh dan bisa berefek kematian. Hal ini mengakibatkan kepanikan di awal berita penyebaran COVID-19 dikarenakan wilayah Kabupaten Lingga yang merupakan daerah kepulauan yang sangat dekat dengan luar wilayah Indonesia. Adanya kepanikan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Lingga dan ketidaksiapan yang dirasakan masyarakat menimbulkan beberapa konflik di awal penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Lingga. Hal ini diperkuat oleh beberapa pernyataan berikut.

"Kalau riak riak di lapangan pasti ada, Karena itu dinamika, pernah kemaren terjadi walaupun tidak terekspos tentang biaya pemulasaran jenazah, akan tetapi sudah dapat diatasi Satgas melalui juru bicara satgas covid."

(Wawancara dengan perwakilan Masyarakat Bapak Zait, ST pada hari Selasa, 11 Januari 2022 Pukul 16.20).

b. Collaborative Process

1) Dialog antar muka

Dalam proses *collaborative government* adanya dialog antar muka dari beberapa pihak yang dilakukan untuk mempercepat dalam penanggulangan COVID 19. Hal ini didukung dari pernyataan berikut

"Sudah beberapa pertemuan mulai dari munculnya Covid 19 Sampai 2021 dan sekarang, mulai saya sebagai Wakil Bupati sampai Saya menjadi Bupati untuk dialog dalam penanganan kasus covid sering kita laksanakan."

(Wawancara dengan Bupati Kabupaten Lingga Bapak Muhammad Nizar,S.Sos pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.14)

2) Membangun kepercayaan

Dalam proses *collaborative government* tidak lepas dengan membangun kepercayaan yang harus dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Lingga kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan kebijakan AKB semakin baik dan angka penurunan COVID-19 semakin menurun.

3) Komitmen pada proses

Proses *collaborative government* harus disertai dengan komitmen yang kuat pada prosesnya sehingga semua hal yang dibangun akan semakin terlaksana dengan baik dan semakin kuat.

4) Pemahaman bersama

Collaborative government yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lingga memberikan pemahaman kepada pihak diluar pemerintahan Kabupaten Lingga. Berdasarkan keterangan yang diberikan informan bahwa pemerintah memberikan sosialisasi yang sangat baik sehingga pemahaman dapat diterima oleh masyarakat. Sosialisasi ini tersebar ke semua media salah satunya media sosial yang sangat di gemari oleh banyak pihak. Sosialisasi lainnya yang diberikan pemerintah diberikan di media lain juga dirasakan seperti berikut ini.

"Bentuk sosialisasinya seperti dengan membagikan masker memberikan pemahaman bagaimana menjaga kesehatan dengan baik, kemudian juga penerapan dari aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait penanggulangan covid 19, melakukan sosialisasi seperti memberikan teguran, sampai selanjutnya setelah mereka memahami penerapan aturan itu dengan memberikan sanksi kepada masyarakat, tentu sangsi yang sifatnya edukatif."

(Wawancara dengan Dosen Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Tarbiyah Lingga Bapak Fathullah, S. Ag, M.Pdi pada hari Senin, 10 Januari 2022 Pukul 16.10)

5) Dampak sementara

Semua proses yang dilakukan memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh semua pihak baik pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini diungkapkan berikut ini.

"Kalau kita bekerja sendiri tentu tidaklah hebat, supaya kerja ini menjadi ringan, penanganan kasus ini sampai terjangkau di tingkat bawah tentu kolaborasi kerjasama dari berjenjang ini, inilah yang dilakukan dari dulu sampai sekarang." (Wawancara dengan Bupati Kabupaten Lingga Bapak Muhammad Nizar,S.Sos pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.14)

c. Facilitative Leadership

1) Sarana dan prasarana

Collaborative Government yang dilakukan memerlukan sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan semua proses dalam memberikan dampak penanggulangan COVID 19 di Kabupaten Lingga yang semakin baik.

"Dengan membagikan Masker, program Vaksinasi secara gratis yang diberikan pemerintah kepada masyarakat." (Wawancara dengan Dosen Administrasi Publik Sekolah Tinggi Tarbiyah Lingga Bapak Fathullah pada hari Senin, 10 Januari 2022 Pukul 16.10)

Sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah Kabupaten Lingga sangat dirasakan oleh semua pihak baik masyarakat umum maupun LSM.

2) Kebijakan pemimpin

Kebijakan pemimpin dalam *collaborative government* juga dirasakan dalam proses penerepan AKB di Kabupaten Lingga.

"Sangat membantu pihak swasta tidak dapat saya sebut satu persatu, peran pihak swasta banyak yang membantu dalam bekerja sama untuk penanggulangan covid 19 di Kabupaten Lingga. Misal pihak swasta membantu dalam pemberian sembako, masker" (Wawancara Bupati Kabupaten Lingga Muhammad Nizar, S.Sos pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.14)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Kabupaten Lingga dijelaskan jika pemimpin dari pihak swasta sangat membantu dalam *collaborative government* yang dirasakan oleh Bupati Kabupaten Lingga. Hal ini di pertegas dengan pernyataan berikut ini.

"Kekuatan pemimpin tentunya sangat berpengaruh terhadap kolaborasi ini, ketegasan dari seorang pemimpin, terus kecerdasan ketepatan dalam mengambil kebijakan dan keputusan sangat berpengaruh terhadap proses kolaborasi yang kita lakukan." (Wawancara dengan Kepala Satgas Covid 19 Bapak Wirawan Trisna Putra, SKM pada hari Senin, 10 Januari 2022 Pukul 13.10)

d. Institutional Design

1) Partisipasi

Partisipasi yang dilakukan dari beberapa pihak sangat membantu dalam proses *collaborative government*.

"Partisipasi dalam penanganan covid ini jelas untuk tenaga kesehatan ada isentif, kemudian kita juga memberikan sembako, penghargaan juga bagi instansi vertikal, RKPD yang telah membantu peran atau kerja pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dalam penanggulangan covid 19." (Wawancara Bupati Kabupaten Lingga Muhammad Nizar, S.Sos pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.14)

Satgas Covid memberikan partisipasi dengan memberikan informasi terkait perkembangan kejadian Covid 19 seperti angka positif dan angka kesembuhan. Selain itu adanya partisipasi-partisipasi lain yang dijelaskan di Kabupaten Lingga. Partisipasi tersebut adalah.

"Saya sering memberikan dukungan dimedia memberikan LIKE ataupun Subscribe melalui social media milik Saya." (Wawancara Masyarakat Bapak Zait, ST pada hari Selasa, 11 Januari 2022 Pukul 16.20)

2) Peranan pihak eksternal

Pihak eksternal yang berkolaborasi dalam penerapan kebijakan AKB untuk penanganan Covid-19 kebanyakan adalah pihak swasta dan LSM. Hal ini dijelaskan sebagai berikut.

"Peranan LSM sesuai kemampuan kami adapun swasta memberikan bantuan masker secara gratis, sembako" (Wawancara Kepala LSM pada hari Senin, 17 Januari 2022 Pukul 12.00)

LSM memberikan perannya dengan pemberian masker gratis dan sembako, selain peranan lain yang diberikan adalah dari bidang pendidikan yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

3) Aturan dan kebijakan

Kebijakan dan aturan diterapkan dalam *Collaborative Governance* dan penerapan AKB untuk penurunan COVID-19. Kebijakan yang di terapkan adalah sebagai berikut.

"Implementasi di lapangan terhadap kebijakan dan peraturan berjalan dengan baik meskipun kita tidak menutup mata ada semacam pelanggaran-pelanggaran atas ketidak patuhan yang terjadi dilapangan, namun implementasi dari aturan yang sudah kita buat dan tentunya kita berkomitmen untuk menerapkan aturan yang sudah kita atau kebijakan yang sudah kita buat." (Wawancara dengan Kepala Satgas Covid 19 pada hari Senin, 10 Januari 2022 Pukul 13.10)

Kepala satgas covid menjelaskan jika sudah membuat beberapa kebijakan yang diterapkan dalam penanganan Covid 19 walaupun adanya ditemukan pelanggaran tetapi aturan tetap diterapkan. Selain itu kebijakan lain diterapkan seperti pembatasan tempat-tempat umum dengan bekerja sama dengan Satpol PP, pemberian sanksi edukatif dan penerapan PERDA dalam penanggulangan COVID 19

2. Faktor-Faktor Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Lingga

Penerapan *collaborative governance* pada penanggulangan COVID-19 dalam menerapkan kebijakan AKB di Kabupaten Lingga sudah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator *starting condition*, *collaborative process*, *facilitative leadership* dan *institutional design* menurut teori *collaborative governance* dari Ansel dan Gash (2007) dibandingkan dengan yang terjadi pada penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Lingga bahwa cukup diterapkan secara optimal.

Pada dimensi *starting condition*, dapat dilihat bahwa indikator kecukupan dan kesiapan sumber daya manusia telah terpenuhi, namun pemberian insentif/penghargaan belum dilakukan karena tidak adanya kebijakan insentif dalam proses kolaborasi penanggulangan Covid-19 dan *pre history* pada saat terjadi Covid-19 menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan dari masyarakat namun dapat teratasi dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi *starting condition* dalam *collaborative governance* untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Lingga sudah berjalan dengan baik.

Pada dimensi *collaborative process*, dapat dilihat bahwa indikator dialog antar muka telah dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan keyakinan pada masyarakat Kabupaten Lingga bahwa penanggulangan Covid-19 dapat diatas dengan baik. Hal ini berpengaruh pada indikator membangun kepercayaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat karena adanya keterlibatan Lurah dan Camat serta RT/RW di lingkungan Kabupaten Lingga. Selain itu, pada indikator komitmen pada proses dapat dilihat bahwa adanya penugasan pada Satgas Covid-19 saat *pra* dan *post pandemic* menjadi cara bagi Kabupaten Lingga dalam penanggulangan Covid-19. Pada indikator pemahaman bersama dan dampak sementara yang dihasilkan akan berpengaruh pada peningkatan sinergi kolaborasi antar instansi pemerintah.

Pada dimensi *facilitative leadership*, dapat dilihat bahwa indikator sarana/prasarana cukup memadai, hanya saja penggunaannya masih minim dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, pada indikator kebijakan pemimpin, pemimpin sudah memberikan yang terbaik dalam mengarahkan dan mengimplementasikan kebijakan yang ada. Pada dimensi *institutional design* dengan indikator partisipasi dapat dilihat bahwa masyarakat sudah terlibat dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Lingga. Hal ini juga didukung dari indikator peranan pihak eksternal yang terlibat di dalam proses kolaborasi untuk penanggulangan Covid-19 dan pihak swasta sudah banyak memberikan bantuan materil dan alat-alat yang diperlukan sehingga pada indikator aturan dan kebijakan lebih berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap aturan protokol Kesehatan.

Hal ini dapat dilihat dari adanya kesinambungan antara temuan wawancara di lapangan, observasi dan dokumentasi yang ada sehingga pelaksanaannya sesuai fakta yang terjadi. Salah satu poin kritikal pada penanggulangan COVID-19 adalah kesiapan dari kolaborasi pihak-pihak yang didukung sarana dan prasarana yang ada di *collaborative process*, hal ini dibuktikan bahwa ketercukupan personil Satgas Covid dan penggunaan sarana prasarana dari berbagai pihak yang berkolaborasi baik dari sisi penyampaian informasi ataupun materil.

Penelitian yang dilakukan oleh Balogh (2012) menyatakan bahwa kehadiran *collaborative governance* (kolaborasi pemerintahan) diawali dengan adanya *starting condition* yang baik terutama dalam membangun kepercayaan sehingga proses kolaborasi lebih terarah dan dialog antar muka yang menjadi bagian dari *collaborative process* harus bersifat transformatif serta berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Lebih tegas penelitian Kallis, Kiparsky, dan Norgaard (2009) menyebut *collaborative governance* sebagai *adaptive management* untuk menjamin keterlaksanaan sebuah program. Sorensen dan Torfing (2012) juga mendukung hasil penelitian ini yang menempatkan *collaborative governance* sebagai ide baru dan inovasi praktis sebagai kekuatan dalam implementasi sektor publik dan pemicu bagi proses pengambilan kebijakan yang lebih baik dalam pelaksanaan *collaborative governance*.

Selain itu, faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator *financial* yaitu belum diaturnya secara spesifik bantuan pada usaha kecil untuk menghidupi kembali daya jual beli masyarakat. Selain itu indikator pada opini masyarakat yang masih terdapat ketidakpercayaan pada Covid-19 dan ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak ingin divaksin dapat menghambat proses kolaborasi di Kabupaten Lingga. Selain itu, pengurusan surat izin dan administrasi bagi jenazah COVID-19 yang membutuhkan beberapa dokumen pendukung serta lamanya proses kepengurusan masih ditemukan di beberapa desa dan kecamatan sebagai faktor yang menghambat proses kolaboratif *governance* dalam penanggulangan COVID-19.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penetian bahwa kolaboratif *governance* dalam penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Lingga sudah berjalan cukup baik, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Starting Condition*: Bahwa dalam indikator sumber daya telah tercukupi dengan baik, sedangkan pada indikator insentif dan *pre history* masih terdapat pelaksanaan yang belum efektif baik dari sisi komunikasi dan penanganan di awal-awal terjadi Covid-19 di Kabupaten Lingga.
2. *Collaborative Process*: Bahwa dalam indikator dialog antar muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama dan dampak sementara yang dihasilkan sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan beberapa pihak baik dari pemerintah Kabupaten Lingga ataupun pihak LSM, Wartawan, Dosen Publik dan masyarakat.
3. *Facilitative Leadership*: Bahwa dalam indikator sarana dan prasarana dari sisi jumlah sudah dapat memenuhi kebutuhan yang ada namun penggunaannya masih minim dilakukan oleh masyarakat. Pada indikator kebijakan pemimpin juga sudah dilakukan dengan baik salah satunya dengan penerbitan edaran secara berkala terhadap penanggulangan covid.
4. *Institutional design*: Bahwa dalam indikator partisipasi, peranan pihak eksternal dan aturan kebijakan sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Lingga. Adanya bantuan materil dari pihak swasta dan peranan LSM serta Universitas di Kabupaten Lingga dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku
5. Faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator *financial* yaitu belum diaturnya secara spesifik bantuan pada usaha kecil untuk menghidupi kembali daya jual beli masyarakat. Selain itu indikator pada opini masyarakat yang masih terdapat

ketidakpercayaan pada Covid-19 dan tidak ingin divaksin dapat menghambat proses kolaborasi yang ada.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Kolaboratif *Governance* Dalam Penanggulangan COVID-19 di Wilayah Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lingga hendaknya melakukan koordinasi, menjalin komunikasi yang baik dan terus melakukan dialog tatap muka dalam pengelolaan anggaran khususnya pada faktor yang menghambat kolaborasi pada indikator keuangan untuk menghidupi kembali daya jual beli masyarakat Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Kabupaten Lingga harus meningkatkan kolaborasi pada pihak eksternal untuk menghindari opini masyarakat yang dapat merusak proses kolaborasi penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Lingga. Kepala Satgas dan LSM hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi ketakutan masyarakat dengan opini vaksin yang tidak baik, dengan cara melakukan dialog antar muka secara berkala kepada masyarakat, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan bersama tanpa harus menyalahkan pihak manapun.
3. Pemerintah Kabupaten Lingga harus menjalin kerja sama lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi untuk penggunaan sarana dan prasarana seperti Penerapan AKB melalui LSM, Dosen Publik di Universitas dan Wartawan yang ada di Kabupaten Lingga.
4. Pemerintah Kabupaten Lingga harus menyusun perencanaan dengan baik, mulai dari perencanaan persiapan pemberian vaksin *booster* di tahun 2022, sosialisasi kepada masyarakat, penyelenggaraan fasilitas dengan kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Lingga, hingga solusi penyelesaian setiap masalah yang kemungkinan muncul.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang berkecimpung membantu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada Bapak Akadun dan Bapak Sofyan sebagai pembimbing dan tim di Universitas Terbuka, Bupati Lingga selaku Ketua TIM Satgas Covid 19 Kabupaten Lingga dan jajarannya dan juga terimakasih kepada informan penelitian, yakni Juru Bicara Satgas Covid 19 Kabupaten Lingga, Perwakilan Wartawan, LSM, STIT Kabupaten Lingga, serta perwakilan Masyarakat.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543–571.
- Balogh, S., Emerson, K., & Nabatchi, T. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1–29.
- Fosler, R. S. (2002). *Working better together: How government, business, and nonprofit organizations can achieve public purposes through cross-sector collaboration, alliances, and partnerships: Executive summary*. Washington DC: Independent Sector.
- Kallis, G., Kiparsky, M., & Norgaard, R. (2009). Collaborative governance and adaptive management: Lessons from California's CALFED Water Program. *environmental science & policy*, 12(6), 631–643.
- Kim, P. S., Halligan, J., Cho, N., Oh, C. H., & Eikenberry, A. M. (2005). Toward participatory and transparent governance: report on the Sixth Global Forum on Reinventing Government. *Public Administration Review*, 65(6), 646–654.
- Kooiman, J. (2003). Societal governance. In *Demokratien in Europa* (hlm. 229–250). Springer.
- O'Leary, R. (2014). *Collaborative governance in New Zealand: Important choices ahead*. New Zealand: Fulbright.
- Raharja, S. D. (2008). *Pendekatan Kolaboratif Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. Disertasi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Skripsi.

Universitas Indonesia.

- Sorensen, E., & Torfing, J. (2012). Introduction: Collaborative innovation in the public sector. *The Innovation Journal*, 17(1), 1.
- Sudarmo. (2009). Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan-hambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. *Jurnal Spirit Publik*, 5(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Kolaboratif Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Wilayah

ORIGINALITY REPORT

14%
SIMILARITY INDEX

14%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%
★ www.researchgate.net
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%